



Faktor Masa Transisi Kepemimpinan Daerah

PEM PROV Kalbar selama enam tahun belakangan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pada LKPD Tahun Anggaran 2018 kemarin, Pemprov Kalbar hanya mampu meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Provinsi Kalbar Sy Kamaruzzaman menuturkan penilaian yang dilakukan oleh BPK sejak Januari hingga Desember 2018 terdapat masa transisi kepemimpinan di Pemprov Kalbar, yakni ketika jabatan Gubernur Kalbar dijabat oleh Pj Gubernur Dody Riyadmadji sejak Januari hingga September 2018, kemudian September hingga Desember 2018 dijabat oleh Gubernur Terpilih, Sutarmidji.

"Dari mulai perencanaan pada bulan Januari seyognya akan berakhir pelaksanaannya sampai Desember 2018, akan tetapi dalam perjalanan di 2018 ada Pilkada pada 5 september gubernur terpilih baru dilantik," ujarnya.

Melihat struktur Perda

APBD 2018 lalu, tentu juga harus mengakomodir visi dan misi Gubernur Terpilih yang baru saja dilantik pada akhir 2018, di antaranya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, percepatan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kami di Pemprov Kalbar telah mengajukan rancangan perubahan. Cuma persoalannya kemarin, beberapa kali dibahas di DPRD tidak quorum," ujarnya.

"Hingga batas akhir dari pembahasan perubahan pada 31 September 2018 tidak ditemukan kesepakatan untuk penentuan perubahan APBD 2018," imbuhnya.

Kamaruzzaman menjelaskan, kebijakan yang diambil Gubernur Kalbar kala itu adalah melakukan pembayaran

transfer daerah dana hasil pajak ke Kabupaten Kota, melalui Pergub dan tanpa melalui mekanisme Perda perubahan APBD tahun 2018.

"Karena beberapa Kabupaten/Kota sudah menyurati Pemprov untuk segera membayar dana bagi hasil tersebut, karena beberapa pembiayaan daerah juga bertumpu pada dana bagi hasil pajak daerah," ujarnya.

Dirinya juga menjamin, bahwa predikat WDP yang baru diberikan oleh BPK RI, bukan karena adanya penyimpangan pengelolaan keuangan, atau ada kerugian daerah atas pengelolaan keuangan daerah. Seluruh konsep pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan, dan obyektif telah dilakukan. **(dan)**